

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi, atau penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni membedakan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi di Indonesia ditandai dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah yakni kemampuan dan tanggung jawab daerah otonom mengendalikan dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar asas otonomi dalam Pasal 1 Ayat 8 UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Suciati dkk. (2015), tujuan desentralisasi yakni meningkatkan pelayanan publik. Desentralisasi dilaksanakan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang publik pemerintah. Pelaksanaan desentralisasi juga diantisipasi akan mengarah pada pemerataan pembangunan daerah.

Sumber daya keuangan yang memadai diperlukan sebagai upaya terwujudnya desentralisasi ini. Desentralisasi fiskal yakni tindakan pengalokasian dana dari tingkat pemerintahan lebih tinggi ke tingkat lebih rendah guna mendukung tugas atau tugas pemerintah berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik (Ndraha dan Uang, 2018). Dengan memberdayakan pemerintah daerah melihat keuangan daerahnya sendiri melalui pemungutan pajak, retribusi daerah, serta desentralisasi fiskal untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Tujuan desentralisasi fiskal yakni memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah melihat pilihan pembiayaan daerah dan memutuskan pengeluaran secara mandiri berdasar tuntutan daerah sebenarnya ada.

Setiap daerah harus mampu membiayai daerahnya sendiri dengan menggunakan sumber keuangan dikuasainya dalam rangka desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah akan sangat dipengaruhi peran pemerintah daerah dalam meneliti dan mengembangkan potensi daerah beragam sebagai sumber pendapatan daerah (Halim, 2015).

Pemerintah daerah diharapkan dapat mendistribusikan dana dalam bentuk penambahan aset daerah, bangunan umum, dan infrastruktur, serta menugaskan anggaran daerah anggaran belanja pegawai. Tanggung jawab pemerintah dapat mencakup pembangunan berbagai infrastruktur publik dan peningkatan standar layanan publik. Pemerintah harus mampu memenuhi

kebutuhan belanja daerah baik belanja langsung, belanja tidak langsung, maupun pengeluaran pembiayaan daerah untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat.

Masing-masing dari 35 Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah, meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, memiliki penerimaan dan belanja keuangan pemerintah. Setiap pengeluaran pemerintah didasarkan atas kepemilikan pendapatan berupa penerimaan dari potensi daerah. Menurut Pasal 285 UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, pendapatan asli daerah lainnya, dan pendapatan transfer, termasuk juga uang diberikan pemerintah federal kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan. Pendapatan Asli Daerah juga termasuk pendapatan asli daerah lainnya sah. Dana Perimbangan ; Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Pendapatan Asli Daerah berbeda dengan pendapatan asli daerah lainnya yakni pendapatan dari sistem pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (Mardiasmo, 2018). Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai prakarsa pemerintah daerah menghimpun dana bagi kebutuhan daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan sehari-hari. Terdapat korelasi positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah karena semakin tinggi kemampuan daerah mengumpulkan PAD, maka distribusi belanja daerah akan semakin longgar (Sasana, 2011).

Namun demikian, tetap saja daerah hanya mengandalkan sektor pendapatan asli daerah tidak mampu menutupi pengeluarannya, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dalam membantu pemerintah daerah menyeimbangkan anggarannya, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan. Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dikenal dengan “dana perimbangan” dimaksudkan menutup kesenjangan fiskal dan meratakan kemampuan keuangan berbagai daerah guna mendukung kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Ketika pemerintah pusat mentransfer uang ke pemerintah daerah, perimbangan keuangan mendorong pemerintah daerah tersebut membiayai pengeluaran daerah (Sasana, 2011).

Menurut kebijakan dana perimbangan, stabilitas keuangan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada uang masuk dari pemerintah federal. Tujuan dana perimbangan untuk mencegah tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah yakni mengurangi disparitas vertikal antara pusat dan daerah, menghilangkan persoalan pengaruh pelayanan publik antar daerah, dan menstabilkan kegiatan ekonomi daerah.

UU. No. 32 Tahun 2004 mengatur transfer dari pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil, dikenal dengan dana perimbangan. Menurut Saragih (2003), dana bagi hasil menggunakan pajak dibagi antara pusat dan daerah sebagai penyeimbang fiskal. Di Indonesia, DAU berfungsi sebagai sarana pemerataan fiskal (fiscal

equalization) antar daerah. Sementara DAK berfungsi sebagai dana berdasar prosedur darurat. Pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan uang tersebut secara bijak dan ekonomis meningkatkan pelayanan masyarakat dengan tetap menjaga akuntabilitas keuangan. Besarnya dana perimbangan disediakan untuk melaksanakan belanja berupa belanja rutin dan belanja pembangunan tergantung dari potensi masing-masing daerah, artinya tidak ada dua daerah sama. Semakin besar potensi daerah, semakin besar pula dana perimbangan disediakan. Kabupaten dengan jumlah penduduk tinggi, sumber daya alam prospektif, atau keduanya tentu saja diberikan dana perimbangan lebih besar.

Penduduk yakni subjek dan tujuan pembangunan, penduduk dan kesejahteraan sangat erat kaitannya. Penduduk dipergunakan sebagai sumber daya dalam proses pembuatan, dan pembangunan itu sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan penghuni (Suciati, Budhi and Jayastra, 2015). Penduduk yakni konsumen cerdas dari layanan ditawarkan pemerintah daerah; karena itu, peningkatan jumlah penduduk memerlukan perluasan infrastruktur dan fasilitas publik, baik dari segi jumlah maupun kualitas (Sulistiani and Mahardhika, 2020).

Konteks permasalahan di atas terdapat beberapa Variable mempengaruhi besaran belanja pemerintah di 37 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor tertentu memiliki pengaruh berapa banyak uang dibelanjakan pemerintah. Judul skripsi yang penulis ambil yakni “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk

terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2017-2021”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan permasalahan penelitian berikut didasarkan pada penjelasan dijelaskan sebelumnya yakni:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Jawa Tengah?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Menganalisis Variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis Variable Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis Variable Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian menyampaikan gambaran terkait faktor berpengaruh belanja daerah serta memberikan kontribusi mengembangkan teori ekonomi perencanaan pembangunan

### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian bermanfaat bagi pemerintah daerah dipergunakan sebagai pertimbangan mengambil kebijakan kebijakan terkait fiskal (keuangan).
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang alokasi berbagai sumber daya dan potensi ada di suatu daerah terkait pemenuhan sarana serta prasarana bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## 1.5 Hipotesis

Hipotesis atau asumsi dasar yakni jawaban sementara terhadap suatu masalah sifatnya dugaan perlu dibuktikan tingkat kebenaran (Sugiyono, 2017). Jawaban dugaan yakni kebenaran sementara, akan diverifikasi data dikumpulkan menggunakan suatu penelitian.

Berikut hipotesis dalam penelitian ini :

$H_1$  : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2021.

$H_2$  : Diduga dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2021.

H<sub>3</sub> : Diduga jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 – 2021.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Hasil sistematika skripsi ini meliputi susunan 5 bagian yakni:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis serta sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang membahas terkait landasan teori berhubungan dengan variable bebas dan tidak bebas, penelitian terdahulu mendukung serta kerangka pemikiran.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode dan model analisis dipergunakan, data dan sumber data, serta definisi operasional dan pengukuran Variable.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang gambaran umum penelitian, Variable penelitian, selanjutnya dapat didefinisikan secara operasional secara hasil estimasi, interpretasi kuantitatif meliputi uraian jenis data dan hitungnya dan diskusi tentang interpretasi ekonomi.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terkait tentang temuan penelitian disimpulkan serta saran ide penelitian selanjutnya.